

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Sofyan. (2023). Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Terpusat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat. *Repository IPDN*, 2-4.
- Alfrida, Ritza M dan Retno Sunu. (2019). Karakteristik Inovasi E-Service Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang (Studi Kasus Pelayanan Akta Kelahiran Dan Akta Kematian). *Journal of Public Policy and Management Review*, 8(4), 3-9.
- Ashafa, Arlina Raudhea. (2022). Pelaksanaan Program E-Service dalam Penerbitan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang. *Repository IPDN*, 2-4.
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang. <https://sidukcapil.semarangkab.go.id/pencatatan-sipil/kepemilikan-akta-pencatatan-sipil> (Diakses 24 Oktober 2022)
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sumatera Utara. Manfaat Akta Kelahiran. <http://disdukcapil.sumutprov.go.id/berita/detail/manfaat-akta-kelahiran> (Diakses 30 Oktober 2022)
- Gulo, W. (2002). *Metodologi Penelitian*. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Indrajit, Richardus Eko. (2016). Konsep dan Strategi *Electronic Government*.
- Karim, Navarin dkk. (2020). Analisis Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Melalui E-Service Quality Di Kota Jambi. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(2), 135-149.
- Keputusan Bupati Semarang Nomor 1874/0515 Tahun 2018 Tentang Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Semarang
- Nashudin. (2016). Manajemen dan Kepemimpinan dalam Pelayanan Publik. Mataram: Sanabil. 112-120
- Nugraha, Joko Tri. (2018). E-Government Dan Pelayanan Publik (Studi Tentang Elemen Sukses Pengembangan E-Government Di Pemerintah Kabupaten Sleman). *Jurnal Komunikasi Dan Kajian Media*, 2(1), 32-37.
- Nupiah, Alhanif. (2023). Implementasi E-Government Melalui Aplikasi Online Anywhere Service (Oase) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat. *Repository IPDN*, 2-8
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Jabatan Fungsional Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Jabatan Fungsional Administrator Database Kependudukan
- Rizkinaswara, Leski. (2020). Revolusi Industri 4.0. <https://aptika.kominfo.go.id/2020/01/revolusi-industri-4-0/> (Diakses 23 Oktober 2022)
- Setiawan, Sintia Ruria. (2022). Persepsi Masyarakat Pada Aplikasi Sipenduk Online Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan di Dinas

- Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang. *Repository IPDN*, 2-8.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sururi, Ahmad. (2016). Inovasi Kebijakan Publik (Tinjauan Konseptual Dan Empiris). *Sawala : Jurnal Administrasi Negara*, 4(3), 1–3.
- Taufiqurokhman dan Evi. (2018). *Teori dan Perkembangan Manajemen Pelayanan Publik*. Tangerang: UMJ Press 2018. 141-235
- Tim KPAI. (2013). Perkawinan Tidak Dicatatkan: Dampaknya bagi Anak. <https://www.kpai.go.id/publikasi/tinjauan/perkawinan-tidak-dicatatkan-dampaknya-bagi-anak> (Diakses 30 Oktober 2022)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
- Wulandari, Herlina. (2020). Efektivitas Inovasi Program Pelayanan Publik Berbasis E-Government (Studi Kasus Aplikasi “Dr . Kepo” Dokter Kependudukan Online di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik). *Jurnal Respon Publik*, 14(3), 27–34.
- Wulandari, Herlina. (2020). Efektifitas Inovasi Program Pelayanan Publik Berbasis E-Goverment. Universitas Islam Malang. 2-5.